

ULAMA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN EKONOMI

Noor Rohman Fauzan

STIE Nahdlatul Ulama Jepara, Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara

Email: rochman.fauzan@gmail.com

Abstract

Group of scholars is the people who occupy important positions in social life. This paper tries to discuss the extent to which the role of the ulama in the face of economic development. Therefore, it is necessary to set out an explanation of the extent to which Islam is able to give meaning to economic activities. Since Islam commands people to always strive in order to create a prosperous life physically and mental. In the face of economic development is not there a reason for the scholars to not get involved.

Keywords: *scholars, Islam, the economic system*

Abstrak

Kelompok ulama merupakan golongan masyarakat yang menempati posisi yang penting dalam kehidupan kemasyarakatan. tulisan ini mencoba membahas sejauh mana peran para ulama dalam menghadapi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, maka perlu dipaparkan sebuah penjelasan mengenai sejauh mana Islam mampu memberi makna kepada aktivitas-aktivitas ekonomi. Karena Islam memerintahkan manusia untuk selalu berusaha dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi tidaklah terdapat alasan bagi para ulama untuk tidak ikut terlibat.

Kata kunci: *ulama', islam, sistem ekonomi*

Pendahuluan

Kelompok ulama merupakan golongan masyarakat yang menempati posisi yang begitu penting dalam kehidupan kemasyarakatan. Karenanya mereka dijuluki oleh Eric Wolf sebagai ‘makelar budaya’ (*cultural broker*) yang penting, sebab merekalah yang menjaga titik simpang yang sulit yang menghubungkan antara sistem lokal ke sistem yang lebih luas dan menyeluruh.[1] Karena pentingnya kedudukan mereka itu, maka keterlibatan mereka dalam keseluruhan dinamika hidup—yang terimplementasikan dalam berbagai aspek; aspek sosial, kultural, politik, ekonomi dan lain-lainnya—tak dapat diabaikan dengan begitu saja. Untuk itu, tulisan ini mencoba membahas sejauh mana peran para ulama dalam menghadapi perkembangan ekonomi.

Selain adanya aspek politik yang telah banyak berpengaruh dalam kehidupan manusia, ternyata terdapat aspek lain yang lebih awal dan sangat menentukan, yaitu aspek ekonomi. Aspek ini, sebenarnya lahir berbarengan dengan eksisnya manusia.

Karena titik tolak ekonomi itu mengacu kepada usaha manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang langka,[2] maka dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah kebutuhan materi. Oleh karena itu terdapat *common sense* dalam percakapan sehari-hari, bahwa ekonomi adalah urusan kehidupan sekarang ini. Di sisi lain juga terdengar ucapan, bahwa agama adalah untuk urusan akhirat. Sehingga tercetus *jargon* ‘tak ada korelasi antara agama dengan tingkah laku ekonomi’.[3]

Islam sebagai *al-dien* (*Syari’at Muhammadiyah*) yang terakhir berpretensi, bahwa Syari’at Islam mempunyai daya-validitas *eternal* (abadi/kekal). Oleh karena itu, maka perlu dipaparkan sebuah penjelasan mengenai sejauh mana Islam mampu memberi makna kepada aktivitas-aktivitas ekonomi, dan sejauh mana Islam mampu menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi sebagai akibat logis dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Islam dan Sistem Ekonomi

Sejak lahirnya Islam telah menganjurkan para penganutnya untuk tidak bermalasan. Islam memerintahkan mereka untuk selalu berusaha dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin. Dalam Al-qur’an Allah SWT berfirman: “*Maka jika kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah (urusan) yang lain dengan sungguh-sungguh.*”[4]. Allah juga berfirman: “*Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.*”[5] Berkaitan dengan hal ini pula Nabi berkata: “*Apabila kamu (telah selesai) melakukan shalat fajar (shubuh), maka janganlah tidur lalu tidak berusaha mencari rizqi*”[6] Jadi, artinya bahwa segala bentuk pengangguran pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Islam.

Sehubungan dengan hal ini, Mubyarto, salah seorang ekonom terkemuka dan guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, mengemukakan:

“Pengangguran dengan segala sumber penyebabnya harus dianggap sebagai ‘penyakit sosial’ yang harus dilenyapkan. Manusia tidak boleh menganggur, karena menganggur tidak saja merupakan pemborosan sumber daya, tetapi juga berarti merendahkan martabat manusia. Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah untuk mengelola segala ciptaannya, tidak untuk menganggur dan meminta-minta. Bekerja adalah ‘amal’ dan sekaligus ‘ibadah’.”[8]

Ajaran-ajaran tersebut bukanlah bersifat kognitif. Akan tetapi Nabi sendiri sebagai contoh terbaik, telah memberikan contoh bagaimana hidup berdikari. Saat masih kanak-kanak, bekerja sebagai penggembala kambing. Saat memasuki usia dewasa, berniaga sampai ke negeri Syam. Kalau diukur dengan masa-masa sekarang, maka usaha perdagangan yang dilakukan itu sejajar dengan usaha ekspor-impor barang ke dan dari luar negeri. Inilah contoh konkrit yang ditampilkan Nabi, sebagai bukti dari tuntunan dan ajarannya yang tidak sekedar normatif konsepsional. Beliau juga berkata

al-dien al-mu'amalah. Artinya agama adalah *mu'amalah* (interaksi kemanusiaan). Hal ini menunjukkan, bahwa keterlibatan Islam dalam dinamika perekonomian sangatlah jelas dan dominan. Agar dapat difahami dan diyakini secara lebih mendalam oleh kalangan umat Islam, Mukti Ali mengatakan, bahwa seperempat dari jumlah masalah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh adalah soal-soal seluk-beluk ekonomi.[9]

Selanjutnya adalah pembuktian melalui pendekatan sejarah. Setelah menelusuri jejak-jejak sejarah Nabi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonominya, banyak pemikir dan ulama Islam yang dengan penuh kesungguhan, mereka merumuskan konsepsi-konsepsi tentang persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya al-Farabi (870-950 M.), Ibnu Siena (980-1037 M.), Imam Ghazali (1058-1111 M.), dan Ibnu Khaldun (1331-1406 M.).[10] Dan untuk lebih jelasnya lagi, masuknya Islam ke kepulauan Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Untuk itu, tepat apa yang dikatakan Mukti Ali bahwa "Hal yang patut dicatat adalah saling kerjasama antara agama Islam dan perdagangan dalam proses ekspansi." [11] Selanjutnya beliau katakan bahwa, "Di antara seluruh agama-agama besar dewasa ini, hanya Islamlah yang tumbuh dalam lingkungan dagang." [12] Hermawan Kertajaya, seorang pakar marketing non-Muslim kelas dunia, dengan menyatakan : "Sebagai pemeluk Katholik, nabi saya saja bukan ahli perdagangan, tapi Nabi Muhammad SAW itu pedagang dan dalam dirinya melekat karakter pemasaran." [13]

Warisan budaya dagang itu nampak sekali di kala kebangkitan organisasi-organisasi Islam pada awal-awal abad ke 20, sebelum Indonesia merdeka. Berdagang yang merupakan bagian penting dari aktivitas-aktivitas perekonomian, dan yang pernah dipraktikkan Nabi ini, ternyata banyak ditapaktilasi oleh ulama'-ulama' pendiri organisasi-organisasi Islam. K. H. Samanhoedhi, misalnya, sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905, mempelopori berdirinya SDI karena terdorong oleh situasi perekonomian saat itu, di mana terjadi kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik dengan golongan Cina.[14]

K.H. Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (1912), di samping sebagai khatib masjid kesultanan Yogyakarta, juga aktif berdagang batik sebagai sumber nafkah hidupnya.[15] K.H. Abdul Halim, pendiri organisasi *Hayatul Qulub* (1911) yang kemudian diganti menjadi Persyarikatan Ulama (1917) di Majalengka, juga menekankan organisasinya dalam bidang ekonomi dan pendidikan.[16] Demikian juga Nahdlatul Ulama' (NU), yang berdiri dipelopori oleh para ulama' (31 Januari 1926) di Surabaya, di samping sebagai organisasi yang mengurus bidang agama juga mencantumkan dalam peraturan dasar organisasinya usaha-usaha mendirikan badan-badan perdagangan.[17] Pada tahun 1937, Kyai Mahfudz, sebagai ketua NU, menganjurkan hendaknya didirikan koperasi-koperasi yang disebut *Syirkah Mu'awanah* di cabang-cabang. Sementara itu *syirkah* (perusahaan) yang sempat berdiri adalah di cabang Surabaya, Singosari, Bangilan dan Gresik. Dan keberhasilan yang dicatat ialah NU pernah mengimpor barang pecah belah dari Jepang dengan diberi cap simbol Nahdlatul Ulama'. [18]

Itulah beberapa usaha perdagangan yang pernah dilakukan para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Tiada lain kesemuanya itu merupakan gambaran faktual upaya-upaya mereka dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang bersifat sosio-ekonomis. Lebih tegasnya lagi mereka tidak hanya memperhatikan urusan-urusan agama (*ukhrawiyah*) saja, akan tetapi mereka sudah mulai menyadari sepenuhnya akan pentingnya peranan ekonomi dalam rangka memperjuangkan dakwah Islamiyah. Dan sekaligus menyadari akan ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dengan segala aspeknya.

Kendatipun bangsa Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun kira-kira hanya 50% dari masyarakatnya yang baru merasakan keberuntungan dalam hidupnya.[19] Dengan itu maka bangsa Indonesia dikategorikan sebagai bangsa yang miskin. Menurut Nurcholish Madjid, satu hal yang sangat pahit untuk disadari ialah bahwa Indonesia, secara potensial, merupakan bangsa ‘ketiga terkaya di dunia’, namun tingkat kehidupannya masih termasuk yang terendah.[20] Untuk itu tepatlah, di masa rezim Soeharto, etos pembangunan ekonomi dijadikan sebagai sesuatu yang paling urgen dalam rangka menciptakan sarana pewujud cita-cita bangsa.[21]

Karena kondisi ekonomi bangsa Indonesia mengalami situasi seperti itu, yaitu kemiskinan, maka secara *random* paling tidak 90% dari mereka adalah orang-orang Muslim atau bahkan bisa lebih – mengingat kondisi ekonomi umat Islam sebelum kemerdekaan yang telah mengalami ketertinggalan. Dengan demikian, maka masalah kemiskinan yang ada, pada hakikatnya adalah masalah kemiskinan umat Islam. Untuk itu para ulama merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Demikian ini mengingat peranannya di tengah-tengah komunitas Muslim yang begitu penting dan menentukan.

Apabila disimak, sebagai sebuah kajian komparatif, keberhasilan pembangunan di Amerika Serikat yang kapitalis itu dinyatakan sebagai hasil dari diterapkannya *Calvanism* dengan doktrinnya tentang ‘*calling*’, atau panggilan, yakni menganggur itu tidak baik atau perbuatan yang diancam Tuhan, dan bekerja keras mencari keuntungan itu baik di hadapan Tuhan.[22] *Calvanism*, dalam kaitan ini, juga disebut ‘Etika Protestan’. Demikian ini menurut tesis Max Weber mengenai hubungan antara etika Protestan dengan semangat kapitalisme modern.[23]

Apabila etika Protestan diyakini dapat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di Amerika Serikat, maka pertanyaan kita sekarang adalah “Apakah Islam yang sarat dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kefitrahan mampu juga berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia?” Pertanyaan ini akan mempunyai implikasi yang lebih jauh, yakni suatu tuntutan akan respon yang *comparable* dan merupakan suatu alternatif yang berdimensi lebih komprehensif dalam tingkat kompetensi-pemecah masalah-masalah kemanusiaan dengan segala aspeknya. Untuk itu, kelompok ulama dituntut untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat dijadikan sebagai jawaban yang

memuaskan secara universal untuk jawaban tersebut. Sebab, nilai-nilai ajaran itulah sumber kekuatan Islam.

Apabila doktrin ‘panggilan’ (etika Protestan) tersebut, sebagai yang telah melahirkan ‘kapitalisme modern’, diletakkan pada porsi pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka yang terjadi adalah ‘malapetaka’. Sebab, Pancasila yang sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan refleksi dari potret bangsa secara utuh (cipta, karsa dan rasa). Ia mencakup nilai-nilai sosio-kultural dan sekaligus nilai-nilai sosio-keagamaan. Manakala bekerja keras untuk memperoleh pekerjaan yang lebih menguntungkan – sebagai doktrin keagamaan yang absah – dimanipulasikan dengan tanpa memperhitungkan aspek-aspek kemanusiaan, maka menurut kesimpulan Weber, kapitalisme yang lahir sebagai idealisme praktis dari kaum borjuis yang bercita-cita untuk masa depan akan berakhir sebagai pesta pora materialism.[24] Oleh karena itulah doktrin tersebut tidak tepat dijadikan sumber nilai ajaran bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebab, akibat yang lebih fatal lagi ialah timbulnya keserakahan manusia atas alam benda. Ini adalah merupakan akibat logis dari materialisme yang dilahirkan dari rahim kapitalisme. Sehingga manusia akan kehilangan keseimbangan dalam hidupnya karena ia hanya mengacu pada sifat manusianya sebagai *homo economicus* yang cenderung serakah. Akhirnya, apa yang terjadi? ‘Malapetaka’, yaitu menurunnya derajat manusia menjadi derajat hewan. Dengan demikian ini, maka runtuhlah nilai-nilai kemanusiaan, cultural maupun keagamaan.

Di samping itu perlu disinggung juga sistem ekonomi yang lain, yaitu ‘Komunisme’. Sistem ekonomi ini juga pernah dianggap berhasil di Uni Soviet, sebelum Glasnost, pecahnya Uni Soviet. Komunisme –sebagaimana kapitalisme – juga berpijak pada dasar yang bersifat materialistik. Ia muncul dengan jargon ‘keadilan sosial’. Namun ternyata keadilan sosial yang dimaksud sangat bertentangan dengan naluri dan kapasitas yang ada pada setiap individu. Falsafah kemasyarakatannya mengatakan, bahwa masyarakatlah satu-satunya yang nyata, sementara individu tidaklah mempunyai arti apapun kecuali sebagai anggota dari masyarakat.[25] Berdasarkan ini, maka komunisme tidak mengakui kemerdekaan memiliki (*hurriyat al-tamalluk*). Dengan demikian, hak-hak perorangan beserta kemerdekaannya dikuasai sepenuhnya oleh Negara. Untuk itu, sangatlah tidak tepat doktrin komunis diterapkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia. Itulah maksud salah satu doktrin komunisme. Dan bagaimana seandainya sistem ekonomi tersebut diterapkan di Indonesia? Maka, jawabnya pun serupa dengan apa yang diuraikan di atas, yaitu ‘Malapetaka’.

Mengapa demikian? Sebab, berdasarkan uraian mengenai maksud doktrin di atas, yakni tidak diakuinya individu dalam Negara, dapatlah difahami bahwa perampasan aspek-aspek individual adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi. Hal itu berarti pembunuhan massal terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Padahal manusia yang disebut sebagai makhluk multi-dimensional mempunyai berbagai keunikan dan kelebihan yang berbeda satu dari yang lain. Karena

falsafah kemasyarakatannya itulah kreativitas-kreativitas manusia tidak bisa diekspresikan secara optimal. Maka 'keadilan sosial' yang didengung-dengungkan Komunisme itu ternyata 'semu'. Dengan demikian, tidaklah tepat sistem ekonomi Komunisme itu untuk diterapkan dalam kerangka sistem ekonomi Indonesia (Pancasila), terlebih lagi dalam konteks *nation building* yang bertujuan membangun manusia seutuhnya. Pendek kata, sinonim Komunisme adalah 'kehancuran'.

Karena kedua sistem ekonomi (kapitalisme dan komunisme) tersebut tidak sejalan dengan falsafah atau derap langkah pembangunan ekonomi Indonesia, maka Islam sebagai syari'at dalam kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai pedoman alternatif dalam merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu sekali diketengahkan pokok-pokok masalah yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam untuk kepentingan pembangunan ekonomi sehingga dapat diketahui adanya korelasi antara Islam dan pembangunan ekonomi.

Ulama dan Perkembangan Ekonomi

Sejauh ini belum banyak ulama' di Indonesia yang berani membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Kebanyakan dari mereka bersikap pasif dan reaktif. Pada hal *fiqih mu'amalah* yang termaktub dalam kitab-kitab kuning, sebagai referensi mereka, berbicara banyak mengenai kegiatan-kegiatan perekonomian. Banyak kemungkinan hal ini diakibatkan oleh terjadinya *split* persepsi –sebagai akibat dari adanya pendikotomian cara pandang terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup manusia – di kalangan ulama'. Sebagaimana dikatakan bahwa terdapat *common sense* dalam percakapan sehari-hari bahwa ekonomi adalah persoalan hidup (dunia) dan agama adalah persoalan akherat. *Common sense* inilah sebagai perwujudan pendistorasian pemahaman agama (pemahaman sekuler) yang telah merambah ke seluruh lapisan komunitas manusia, termasuk komunitas Muslim itu sendiri.

Namun, amatlah mustahil jika Islam, dalam hal ini Al-qur'an dan Hadits Nabi, tidak membicarakan masalah-masalah ini, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi, mengingat pentingnya persoalan itu bagi kehidupan.[26] Dalam hal ini tema yang paling mencolok ialah tema anti ketidakadilan ekonomi.[27] Di samping itu, tentu saja, kecaman terhadap pengangguran dan perbuatan yang tidak bermanfaat serta bekerja keras – yang kebetulan sama dengan etika Protestan – tetap merupakan nilai-nilai ajaran yang amat penting dan prinsipil dalam usaha memotivasi umat.

Dengan menggunakan jurus anti ketidakadilan ekonomi itu (mafhumnya ialah menegakkan keadilan seosial dalam kehidupan), maka sebenarnya para ulama mempunyai modal dan kemampuan cukup dalam membicarakan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan ekonomi secara aktif. Sebab, keadilan sosial merupakan titik sentral ekonomi Indonesia yang sosialis, dan merupakan tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia.[28] Namun, perlu dicatat juga, bahwa bentuk dan corak ekonomi yang sosialis tersebut bukanlah semakna dengan yang dimaksud dalam konteks Negara-negara Blok Timur, akan tetapi yang dimaksud adalah sosialis yang religius

(sosialisme-religius). Sosialisme-religius inilah sebagai jawaban alternatif terhadap kapitalisme dan komunisme untuk konteks Indonesia. Dan dalam hal ini, secara lebih jauh, Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa :

“Sosialisme menjadi tidak hanya merupakan komitmen kemanusiaan, tetapi juga ketuhanan. Bung Hatta, dalam menerangkan bentuk kesalinghubungan antar sila dalam Pancasila, senantiasa menegaskan bahwa sila ketuhanan merupakan sila yang menyinari sila-sila lainnya, merupakan dasar moral yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kenegaraan dan kemasyarakatan kita.”[29]

Dari penjelasan di atas nampaklah dengan jelas bahwa sosialisme, yang merupakan dasar daripada ekonomi Indonesia, yang dimaksud adalah sosialisme yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (agama), bukan sosialisme-materialistik sebagaimana yang dipahami oleh kaum komunis.

Berdasarkan uraian-uraian di atas pula, dapatlah dipahami bahwa ekonomi sosialis Indonesia adalah ekonomi yang sepenuhnya berorientasi kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa (yaitu mencakup etik moral agama dan bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tak mengenal perampasan hak individual/komunal, saling menghormati, menjaga prestise setiap individu); Persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak saling mematikan, bantu-membantu antar individu, patriotisme ekonomi); Kerakyatan (demokrasi ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat/rakyat sentris dan kebutuhan orang banyak); dan Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang)[30]. Karenanya ia juga disebut “Ekonomi Pancasila”.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi – dalam konteks Indonesia untuk masa kini dan yang akan datang – tidaklah terdapat alasan bagi para ulama untuk tidak ikut terlibat. Sebab ekonomi adalah persoalan penting yang menyangkut soal nasib hidup seseorang secara materi, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Supaya nilai-nilai Islam itu dapat terserap ke dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional, maka para ulama dituntut untuk mampu memperkenalkan nilai-nilai ajaran Islam yang relevan dengan pokok masalah – dalam hal ini aktivitas-aktivitas ekonomi –, kemudian menjelaskannya secara lebih operasional sehingga terbukti validitasnya di tengah-tengah hiruk-pikuknya kehidupan manusia. Suatu contoh ialah zakat: bagaimana melaksanakan ibadah zakat itu sehingga sesuai dengan fungsi asalnya; dan bagaimana pendayagunaannya sehingga kemanfaatannya secara makro dapat dijadikan sebagai rujukan kajian ekonomi dalam kaitannya dengan penataan dan pembangunan ekonomi nasional secara nyata.

Secara konsepsional perlu diketengahkan juga pokok-pokok pendirian ekonomi menurut Islam, yaitu:

1. kewajiban bekerja,
2. membasmi pengangguran,
3. mengakui hak milik,

4. kesejahteraan agama dan sosial, dan
5. iman kepada Tuhan,
6. keadilan sosial. [31]

Inilah pokok-pokok pendirian ekonomi Islam yang secara harfiah ataupun maknawiah sesuai dengan situasi Indonesia yang menganut Sistem Ekonomi Pancasila, sebagaimana diuraikan di muka. Oleh karena itu, dengan bekal pemahaman secara mendalam terhadap pokok-pokok tersebut dan kemampuan menjelaskan atau mengartikulasikannya, maka para ulama diharap untuk mampu mengikuti perkembangan-perkembangan dalam dinamika ekonomi dan malahan diharapkan peran aktif mereka dalam membentuk dan membangun bangunan strategi ekonomi Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Sebab, sudah menjadi kesepakatan nasional, bahwa Pancasila adalah dasar falsafah hidup bangsa Indonesia dan dalam saat yang sama pembangunan ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang sepenuhnya berorientasi kepada kesemua sila dari Pancasila. Maka, amatlah tepat jika konsepsi ekonomi Islam itu dapat diletakkan pada kerangka pembangunan ekonomi Indonesia. Namun harapan tersebut terpulang kembali kepada kepekaan para ulama terhadap masalah-masalah ekonomi yang selalu berkembang dan kompetensi mereka itu sendiri. Mampukah mereka mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang begitu dalam dunia ekonomi? Itulah pertanyaan yang perlu mereka jawab.

Daftar Pustaka

- [1] Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, "Ulama dalam Perspektif Sejarah", *Pesantren*, No.4/Vol.II/1985, h.7, (dikutip dari Eric Wolf, "Aspect of Group Relation in a Complex Society", *American Antropology*, jilid 88, No.6 (Desember 1956), pp.1068-1078.
- [2] Baca Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1977, h. 23.
- [3] Baca Mukti Ali, H.A., *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Yogyakarta : PLP2M, 1985, h. 191.
- [4] *Alam Nasyrah* (94) : 7.
- [5] *Al-Baqarah* (2): 201.
- [6] *Al-Jami' al- Shaghir*, juz 1, h. 96.
- [7] *Al-Nisa'* (4): 95.
- [8] Mubyarto, "Zakat di Negara Pancasila", *Pesantren*, No.2/Vol.III/1986, hal 31.
- [9] Mukti Ali, *Op.Cit.*, hal 202.
- [10] Baca Zainal Abidin Ahamad, H., *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h.242-312.
- [11] Mukti Ali, *Op.Cit.* h. 207.
- [13] Harian, "Republika", 16 Desember, 2010.
- [14] Baca Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta : LP3ES., 1980, h. 115.
- [15] Baca *Ibid.*, h. 86.

- [16] Baca *Ibid.*, h. 80-82.
- [17] Baca *Ibid.*, h.252.
- [18] Baca *Ibid.*, h.253.
- [19] Baca Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Idayu, h. 37-68.
- [20] Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan*,(selanjutnya disebut *Islam*), Bandung: Mizan, 1987, h. 97.
- [21] Baca *Ibid.*
- [22] Baca *Ibid.* h. 143; juga baca Mukti Ali, *Op.Cit.*, hh. 196-197.
- [23] Lihat *Islam*. h. 143.
- [24] *Ibid.*, h 144, (diambil dari Max Weber, *The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism*,(terjemahan Talcott Parsons), New York, 1958, hh.2-3 (pengantar oleh R.H. Tawney).
- [25] Lihat Muhammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam*, (terjemahan Hersri), Bandung:Penerbit Pustaka, 1982, h.341.
- [26] Baca *Islam*, h.101.
- [27] Lihat *Ibid.*, h. 102.
- [28] Baca *Ibid.*, h. 107
- [29] *Ibid.*, h. 108
- [30] Baca Sri Edi Swasono, *Orientasi Ekonomi Pancasila*, dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (Eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- [31] Zainal Abidin Ahmad, H., *Op.Cit.*, h. 125.